

PENGUATAN NASIONALISME MELALUI AKTIVITAS EKONOMI DI PULAU TERLUAR INDONESIA (Studi di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis-Riau)

Muslim, Muklis, Mahendra Romus, Riki Handri Malau, M. Rachmadi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM 18 Pekanbaru – Riau, 28293

E-mail : muslim.msi@uin-suska.ac.id (Korespondensi)

diterima: 12/3/2023; direvisi: 11/9/2023; diterbitkan: 26/9/2023

Abstract: The erosion of the sense of nationalism which lies in the threat of disintegration and migration of the population, the people of the border areas must be handled seriously. The development of border areas, especially in the Rupat Island area, has recently undergone many changes. The government with a policy of developing Indonesia from the periphery (border area) as an effort to change the face of the border and the outermost island areas both from the side of the border (border) as well as the accessibility of the community in various services, as well as infrastructure development in the border area has an impact on the economy. This research method uses the Mixed Methods technique which will combine qualitative methods with quantitative methods simultaneously in order to obtain more comprehensive, valid and objective data. The results of the study explain that the construction of road infrastructure and the operation of the "roll on roll off" (RoRo) ferry crossings for passenger and freight transportation have changed the pattern of community economic activity, both in terms of consumption, as well as *dukupun*. This change in the pattern of economic activity has strengthened the nationalism of the people on Rupat Island

Keywords: *Nationalism, Economic Activity, Border Areas*

PENDAHULUAN

Pulau terluar merupakan kawasan perbatasan dan etalase yang dapat merepresentasikan kedaulatan sebuah negara. Bila sebuah kawasan perbatasan tidak mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah maka tentu saja akan menimbulkan dampak yang besar seperti disintegrasi bangsa dan terkikisnya rasa nasionalisme. Salah satu persoalan berat yang harus diselesaikan bangsa kita saat ini adalah kesenjangan pembangunan serta pertumbuhan (*growth*) baik secara ekonomi maupun sosial budaya, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, yaitu dalam rangka menjaga stabilitas keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan pada pulau terluar, maka perlu adanya pengelolaan pulau kecil terluar dengan

memperhatikan keselarasan antara pembangunan di berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan. Pulau terkecil terluar adalah pulau dengan luas wilayah kurang atau sama dengan 2000 km² yang memiliki titik dasar koordinat geografis sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Pembangunan kawasan perbatasan menjadi prioritas sangat penting sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menyantumkan Visi Pembangunan Nasional (Terwujudnya Perekonomian yang Maju, Mandiri, dan Mampu Secara Nyata Memperluas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berlandaskan pada Prinsip-Prinsip Ekonomi yang Menjunjung Persaingan Sehat dan Keadilan, serta Berperan Aktif dalam Perekonomian Global dan Regional dengan Bertumpu pada Kemampuan serta

Potensi Bangsa). Kebijakan untuk merealisasikan visi tersebut Pemerintah menetapkan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dimana salah satunya ialah membangun Indonesia dari pinggiran (kawasan perbatasan).

Keberadaan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan perekonomian ditandai dengan peningkatan produktivitas faktor produksi, mobilitas masyarakat, dan distribusi barang dan jasa. Kwik Kian Gie (2004) mengungkapkan bahwa secara makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur akan mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan pelayanan jasa infrastruktur berpengaruh pada pengurangan cost of production. sejalan dengan hal tersebut Todaro (2006) menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi percepatan maupun perluasan pembangunan suatu negara.

Aktivitas masyarakat Pulau Rupert sebagian besar berprofesi sebagai petani terutama di perkebunan karet dan sawit. selain menjadi petani masyarakat Pulau Rupert juga terkadang menjadi nelayan dalam mengisi waktu luangnya, hal ini dilakoni tidak lain untuk mencari tambahan pendapatan dari waktu luang yang tersisa dari profesi menjadi petani.

Dalam kurun waktu yang lama masyarakat di Kasawan Pulau Rupert banyak melakukan aktivitas ekonomi di Negara Malaysia seperti berkerja sebagai mata pencarian dan masyarakat memiliki kecenderungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya banyak mengkonsumsi produk buatan Malaysia, diantaranya adalah kebutuhan yang menyangkut bahan makanan pokok. Lebih dari itu, ancaman terbesar seperti hasil penelitian Saru Arifin (2009) yang menyebutkan bahwa wilayah perbatasan dan kawasan pulau

terluar riskan terjadi migrasi penduduk dimana masyarakat perbatasan berpindah kewarganegaraannya.

Ulama yang mecandang gelar Hadratus-Syeckh (Guru Besar) KH. Hasyim Asy'ari mempopulerkan istilah Hubbul Wathon Minal Iman (Mencintai Negeri/Negara bagian dari keimanan) maksudnya adalah Nasionalisme menjadi penting dalam suatu negeri karena dengan nasionalisme yang kuat negeri tersebut tidak mudah dijajah dan ditindas oleh bangsa asing. Dalam arti yang lain negeri menjadi tenang, aman dan tentram sehingga memudahkan kita untuk beribadah dan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penelitian Cahyo Pamungkas (2015) yang memenuhi kualifikasi mendiskripsikan pengetahuan dan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan laut Melayu Karimun serta kehadiran negara dalam pemeliharaan rasa kebangsaan tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian Agus Mansyah (2017) bahwa mendapat nilai baik rasa nasionalisme baik masyarakat Indonesia di perbatasan Kabupaten Sanggau, hal ini dipacu dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan rasa kebangsaan pada masyarakat diwilayah perbatasan.

Disisi lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Saru Arifin (2009) memaparkan bahwa Migrasi Penduduk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak lebih diwarnai oleh beberapa motif diantaranya adalah sulitnya pencarian ekonomi dan akses pendidikan maupun kesehatan diwilayah perbatasan. hal ini juga yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat pulau rupert yang mana masih terbatasnya akses pendidikan, dikarenakan jumlah prasarana pendidikan diwilayah rupert masih minim jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yaitu sebanyak 36.356 Jiwa hal ini dapat dilihat dari data pada tabel berikut:

No	Kategori Sekolah	Bangunan	Jumlah
1	SD		33
2	SMP		8
3	SMA/SMK/MA		10
4	Perguruan Tinggi		-

Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesak Iek (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di pedalaman Irian Jaya memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan usaha ekonomi masyarakat dan efek multiplier yang sangat signifikan kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasa nasionalisme merupakan hal yang penting bagi keutuhan suatu bangsa, hal ini penting diperhatikan oleh sebuah negara jika ingin menjaga keutuhan dan eksistensi negara tersebut dikancah dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Nasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham atau ajaran yang terpatrit dalam diri setiap orang akan cinta negara dan bangsa atas kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita luhur dari negara tersebut.

Ketika nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, menjadi modal dasar dan fundamental sebagai kekuatan yang luar biasa untuk membangun suatu bangsa. Mengingat pentingnya nasionalisme bagi keutuhan bangsa, maka gerakan politik nasionalisme menurut John Hutchinson (2000, p. 34) adalah sebuah sarana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk menemukan dan mendapatkan jati diri sehingga menjadi identitas yang melekat dan kebanggaan bersama. Secara umum aktivitas ekonomi dapat di kelompokkan menjadi aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi (Yurial, 2014). Secara umum aktivitas ekonomi sudah barang tentu memiliki dinamika yang terjadi ditengah masyarakat dimana

ekonomi mengalami proses pertumbuhan ataupun sebaliknya.

Beberapa tahun belakangan ini kita melihat pembangunan infrastruktur menjadi perhatian yang sangat menarik untuk diikuti dalam memperhatikan sebuah perkembangan dari suatu negara. Dalam memahami lebih jauh mengenai infrastruktur maka dapat diketahui pengertian Infrastruktur yang tercantum dalam beberapa versi. Infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R.J.,2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Dalam ilmu ekonomi berbicara infrastruktur maka dapat di analogikan sebagai wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003). Sedangkan menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur memiliki dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar- dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005). Mankiw (2003) menyatakan pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal ini sejalan dengan

penjelasan yang dikemukakan oleh Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Kawasan pulau terluar dan perbatasan merupakan daerah yang sangat fundamental bagi sebuah negara, hal dikarenakan daerah tersebut merupakan sebuah etalase dan representatif dari sebuah negara. Menurut Moodie (2010, p. 35).

Ketika terjadi permasalahan perbatasan dari suatu negara, maka akan ada dua negara ataupun lebih yang bertikai dengan mengedepankan peraturan tentang batas wilayah suatu negara melalui hukum internasional. Begitu juga isu perbatasan dilihat berdasarkan perspektif sosial budaya. Hal ini, membuat perbatasan memiliki definisi baru menurut Tirtosudarmo (2007,p.24), yaitu merupakan sebuah konstruksi sosial budaya yang tidak terkait lagi pada pengertian yang bersifat teritorial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah Penelitian Dasar Interdisipliner, dimana bertujuan untuk mengembangkan kajian keilmuan dan pengetahuan dengan melibatkan Ilmu Administrasi Negara dalam hal kebijakan Publik dalam rangka menelaah dan memberikan rekomendasi program kebijakan pemerintah dan Ilmu Manajemen dalam hal menganalisa aktivitas ekonomi masyarakat pulau rupa sebagai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menentukan sektor potensial sebagai aktivitas atau kegiatan produksi Masyarakat Pulau Rupa, pada penelitian ini menggunakan pendekatan tipologi Klassen :

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	gi > = g	gi <= g
si > = s	Sektor maju dan Tumbuh pesat	Sektor maju tapi tertekan
si < = s	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	Sektor relative tetinggal

Dari hasil analisa tipologi klasen di dapat tiga sektor potensial, yaitu : (a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan rata-rata pertumbuhannya 0,32 dan dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,09. Dimana diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan di Kawasan Pulau Rupa Tengah lebih besar dari rata-rata pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis ($0,32 > 0,09$). Sedangkan distribusi lebih kecil dari Kabupaten Bengkalis ($49,0\% < 58,7\%$) dengan kesimpulan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terletak pada kuadran 3 dimana sektor tersebut merupakan Sektor Potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kawasan Pulau Rupa Tengah memang menjadi sektor unggulan setiap desa yang ada memiliki lahan pertanian dan pekerbunan yang luas dengan jenis tanaman karet dan sawit. Sedangkan sektor perikanan disamping potensi ikan yang besar dengan nilai jual yang tinggi, di Kawasan Pulau Rupa Tengah saat ini sedang dilakukan investasi tambak udang oleh masyarakat. (b) Pedangan Besar dan Eceran rata-rata pertumbuhannya 0,32 dan dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,01. Dimana diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan di Kawasan Pulau Rupa Tengah lebih besar dari rata-rata pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis ($0,32 > 0,01$). Sedangkan distribusi lebih kecil dari Kabupaten Bengkalis ($27,0\% < 38,2\%$) dengan kesimpulan bahwa sektor Pedangan Besar dan Eceran terletak pada kuadran 3 dimana sektor

tersebut merupakan Sektor Potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. (c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pertumbuhannya -0,06 dan dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis sebesar -0,08. Dimana diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan di Kawasan Pulau Rupert Tengah lebih besar dari rata-rata pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis $(-0,06 > -0,08)$. Sedangkan distribusi lebih besar dari Kabupaten Bengkalis $(7,5\% > 1,6\%)$ dengan kesimpulan bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terletak pada kuadran 1 dimana sektor tersebut merupakan Sektor maju dan tumbuh pesat.

Dalam kurun waktu yang lama masyarakat di Kasawan Pulau Rupert banyak melakukan aktivitas ekonomi di Negara Malaysia seperti berkerja sebagai mata pencarian yang menjadi pokok penghidupan keluarga. Data yang didapatkan dari dua desa yang disurvei yaitu desa Parit Kebumen dan Desa Dungun Baru bahwa setiap laki-laki dewasa maupun laki-laki usia remaja/pemuda 98% pernah bekerja di Malaysia baik bekerja dengan kelengkapan dokumen keimigrasian, maupun masuk secara ilegal. Fenomena ini terjadi lama hingga sampai pada tahun 2000-an.

Bersumber dari informan dengan inisial MRS, KER, dan KJ memberikan keterangan bahwa banyak masyarakat Pulau Rupert yang bekerja di Malaysia dalam tempo waktu yang lama sehingga mereka memiliki IC (Identity Card). Sebagian besar memiliki IC Penduduk Tetap (IC-Permanent Resident) dan ada yang sudah memiliki IC Biru (warganegara).

Bertumbuhnya ekonomi di Pulau Rupert dengan giatnya pembangunan Infrastruktur jalan dan beroperasinya kapal penyeberangan angkutan penumpang dan barang roll on roll off

(RoRo) yang dimulai pada tahun 2011, membuat aksesabilitas keluar masuk Pulau Rupert Menjadi mudah bagi masyarakat, hal ini secara tidak langsung memberikan warna dan perubahan masyarakat Pulau Rupert.

Pergeseran pola produksi masyarakat Pulau Rupert ini dapat dilihat oleh Peneliti berdasarkan Pengamatan di perjalanan mulai dari daerah Pelabuhan RoRo Tanjung Kapal hingga Rupert Utara sepanjang jalan banyak masyarakat melakukan aktivitas produksinya di kedua komoditas ini yaitu sawit maupun karet, dan sebagian yang lain masih melakukan Usaha Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Boat Besar atau Bagan yang masih bertahan. selain itu Peneliti juga menemukan beberapa usaha tambak udang yang sedang berkembang di Pulau Rupert yang dilakoni Masyarakat Pulau Rupert.

Produksi Komoditas Sawit maupun Karet di Pulau Rupert dalam pemenuhan kebutuhan akan Bibit, Pupuk maupun peralatan dalam proses produksinya kini dapat dipenuhi oleh produk produk dalam negeri Indonesia begitu pula peralatan Nelayan maupun peralatan Tambak, yang mana sebelum adanya pembangunan akses infrastruktur berupa jalan maupun Angkutan Roro banyak kebutuhan tersebut di pasok dari negara tetangga yaitu Malaysia. Dengan pembangunan yang dipusatkan pada infrastruktur jalan membuat arus barang baik konsumsi maupun barang modal yang dibutuhkan oleh Para Pekebun, Petani, Nelayan dan Petambak, memberikan pilihan alternatif terhadap barang kebutuhan diatas. Yang mana sebelumnya hampir sebagian besar barang kebutuhan Konsumsi maupun Barang Modal hampir keseluruhannya disuplai dari negeri tetangga Malaysia dengan harga yang cukup tinggi dikarenakan adanya perbedaan Kurs Mata Uang Ringgit.

Hasil temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Markarius Erwin Bria dan Suharno (2018) mengungkapkan bahwa pendekatan kesejahteraan merupakan bagian strategy yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka menguatkan rasa Nasionalisme masyarakat perbatasan melalui pembangunan dan peningkatan Infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan ada hal tersebut dapat merubah pola lama yang dilakukan masyarakat perbatasan baik dalam hal mata pencaharian (Pekerjaan) maupun Pola Konsumsi pada masyarakat perbatasan. Dale,dkk (2010), dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan sebuah upaya atau kebijakan yang strategis sebagai arah atau roadmap pemerintah dalam sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat (seperti peningkatan infrastruktur seperti jalan, transportasi dan energi) di masyarakat perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah sehingga pada akhir dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sejahteraan dan meningkat kualitas kehidupannya.

Warsilah dan Wardiat (2017) dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat perbatasan penting untuk melakukan usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai cara agar kondisi perekonomian masyarakat perbatasan meningkat, cukup dalam hal pemenuhan pangan, dan memiliki daya saing dalam hal produk lokal, dengan adanya pemberdayaan dan peningkatan tersebut diharapkan ketergantungan masyarakat perbatasan kepada negara tetangga baik dalam hal lapangan pekerjaan maupun pemenuhan bahan pangan dapat dihindari.

Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan

penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan Perbatasan dapat dilakukan oleh penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di daerah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan. Perdagangan ini tentunya harus melalui Pos Lintas Batas, penduduk yang melakukan perdagangan ini disebut dengan Pelintas Batas.

Secara spesifik Kabupaten Bengkalis juga mengatur pelaksanaan perdagangan lintas batas ini dengan sejak adanya Surat Keputusan Bupati No. 364/IND/2001. Keputusan ini mengatur Pelintas Batas dengan syarat sebagai berikut : (1) Berdomisili di wilayah perbatasan yang disahkan dengan Kartu Tanda Penduduk, (2) Memiliki Paspor Republik Indonesia (3) Membawa barang berupa hasil pertanian dan kerajinan yang dihasilkan oleh daerah perbatasan yang masuk maupun keluar dengan nilai tidak lebih dari 1.500 dolar AS (Rp. 22.500.000) untuk satu kali pelayaran perorangan yang dilaporkan dalam satu daftar barang/komoditi. (4) Pelintas Batas wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku di negara tujuan (Malaysia) serta memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan oleh instansi berwenang. (5) Melapor keberangkatan dan kedatangan kapal pada Pos Perdagangan Lintas Batas (PPLB) dan (6) Melaporkan komoditi/barang yang dibawa masuk kepada petugas dengan melampirkan administrasi yang diperlukan.

Berdasarkan penelusuran peneliti menggunakan speed boat sepanjang pesisir Pulau Rupat, mulai dari Selat Morong terus masuk ke pesisir Pantai Ketapang dilanjutkan lagi ke Pesisir Pantai Rupat Utara hingga ke Beting Aceh / Pulau Babi. Peneliti menemukan banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan yang minim pengawasan dari pihak yang

berwenang, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan membawa barang-barang dari Malaysia. Begitu juga penyeludupan Narkoba melalui Pulau Rupert, jarak yang sangat dekat dan pengawasan yang minim tentu penyeludupan benda haram ini bisa terjadi. Sering diliput media nasional maupun lokal penyeludupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui Pulau Rupert dengan nilai transaksi yang sangat besar.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Husin Affan dan Hafidh Maksum (2016) menyatakan pentingnya mempertahankan nasionalisme agar jatidiri bangsa dapat menangkal budaya asing yang masuk melalui perbatasan.

Pola konsumsi masyarakat pulau rupert dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian, sebagai berikut : (a) Kebutuhan bahan makanan pokok dan lainnya, Sebagai masyarakat pesisir dan pulau terluar, masyarakat Pulau Rupert dalam memenuhi kebutuhan dasarnya saat ini banyak mengkonsumsi produk-produk Indonesia khususnya bahan makanan pokok. Hal ini berbeda dengan sebelum adanya perbaikan Infrastruktur jalan dan beroperasinya Kapal penyeberangan angkutan penumpang dan barang roll on roll off (RoRo) yang dimulai pada tahun 2011, dengan pembukaan akses transportasi darat yang memadai berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti banyak mobil-mobil salesman yang membawa bahan makanan warga berdatangan menyuplai toko-toko kelontong yang ada di wilayah Rupert, dengan demikian ketergantungan suplai bahan makanan pokok dari negara tetangga hampir sebagian besar telah dipenuhi oleh produk dalam negeri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Markarius Erwin Bria dan Suharno (2018) melalui peningkatan pembangunan infrastuktur diwilayah

perbatasan dapat merubah pola konsumsi masyarakat yang mana sebelumnya memiliki ketergantungan dari suplai negara tetangga.

Kebutuhan akan informasi melalui media tontonan Siaran Televisi dan Frekuensi Radio mempengaruhi pola hidup masyarakat. Seperti hasil penelitian Sandra I. Telussa (2022), Edi Ardian (2019), dan Hamdani M. Syam (2015) menerangkan bahwa tontonan baik Televisi maupun radio mempegaruhi pola hidup dan cara pikir (mindset) suatu komunitas. Keterbatasan media informasi seperti Siaran Televisi dan Frekuensi Radio Nasional di Pulau Terluar Indonesia Khususnya Pulau Rupert menjadi persoalan penting untuk dikaji.

Kedekatan geografis dengan negara tetangga sehingga mudah mengakses media informasi yang disajikan diberbagai Chanel Televisi Malaysia dan Frekuensi Radio Malaysia berpegaruh pada nasionalisme, pengetahuan kewiraan dan rasa eksistensi kewarganegara. Masyarakat Pulau Rupert lebih mengenal Negara Malaysia, pola dan sistem pemerintahan serta jajaran pemerintahannya dibandingkan dengan negara sendiri, karena sudah terbingkai lama oleh mengkonsumsi media informasi dari negara tetangga tersebut.

Pada tahun 2010-an mulai terjadi pergeseran pola konsumsi media informasi, masyarakat satu persatu menggunakan perangkat elektronik (parabola) yang dapat mengakses siaran televisi nasional. Hal serupa juga terjadi pada akses informasi melalui media komunikasi ditandai dengan berdirinya menara telekomunikasi di Pulau Rupert. Sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui handphone dan media informasi lainnya.

Dibawah tahun 2010-an hampir 100% kendaraan (motor roda dua) di Pulau Rupert didatangkan dari Negara Malaysia. Keberadaan kendaraan ini tentu tidak melalui proses dan adminitrasi yang

resmi, dan penggunaan kendaraan ini hanya dipakai di pulau ini saja. Setiap rumah bisa saja memiliki 2 atau 3 kendaraan, bahkan bisa lebih. Karena harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kendaraan di Indonesia. Pada tahun 2000-an harga kendaraan dari Malaysia paling mahal 4 jutaan, jika dibandingkan dengan harga kendaraan dengan kondisi kendaraan yang sama di Indonesia sudah sampai harga 10 jutaan.

Diatas tahun 2010-an, masyarakat sudah menggunakan kendaraan dengan plat nomor polisi, yang artinya masyarakat sudah menggunakan kendaraan dari Indonesia disebabkan dibukanya akses jalan darat dan beroperasinya Kapal penyeberangan angkutan penumpang dan barang roll on roll off (RoRo) dimulai pada tahun 2011.

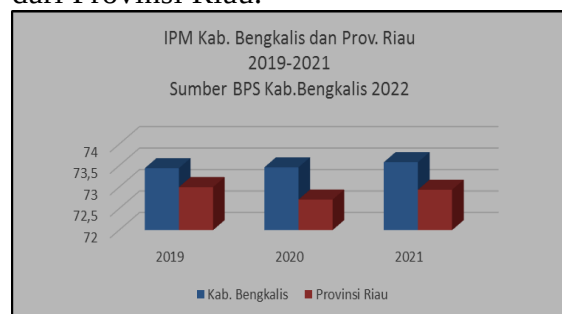
Selain perubahan atau pergeseran pola produksi, distribusi maupun pola konsumsi masyarakat Pulau Rupat, terdapat juga perubahan pada transaksi penggunaan mata uang ringgit dalam aktivitas ekonomi warga. berdasarkan informasi yang dihimpun melalui Key Informan dan observasi lapangan, banyak warga rupat dalam melakukan transaksi ekonomi menggunakan mata uang ringgit. Ini disebabkan adanya warga Pulau Rupat baik bekerja maupun menjual hasil produksinya seperti ikan maupun hasil pertaniannya dijual ke negara tetangga sehingga hasil penjualannya mendapatkan mata uang ringgit. sehingga peredaran Mata Uang Ringgit pada saat itu sangat tinggi. Pasca adanya perbaikan akses jalan dan juga himbauan pemerintah melalui sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia di pulau pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, sekarang masyarakat lebih dominan menggunakan Mata Uang Rupiah dibandingkan dengan Mata Uang Ringgit.

Berkaitan dengan penggunaan uang asing di Indonesia, mengacu pada

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur dengan tegas bahwa siapa pun yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib bertransaksi menggunakan rupiah sebagai alat tukar pembayaran, dan jika tertangkap tangan bertransaksi menggunakan mata uang asing dapat diancam dengan sanksi pidana berupa kurungan hingga satu tahun dan denda Rp. 200 juta.

Pembahasan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Muhammad Ridho Iswardhana, dkk (2017:136) mengemukakan bahwa pemerintah dalam rangka meningkatkan penggunaan mata uang rupiah di wilayah perbatasan penting untuk dibangun sarana prasarana dan sentra ekonomi perbatasan, hal ini dilakukan agar kegiatan produksi maupun pendistribusian hasil produksi masyarakat perbatasan dapat dilakukan di wilayah Indonesia, dengan harapan kegiatan tersebut dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan data Statistik yang ada Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis selama 3 tahun belakangan, memiliki nilai indeks yang lebih baik jika dibandingkan dengan nilai perolehan IPM dari Provinsi Riau.



Berdasarkan data diatas tercatat bahwa IPM Pulau Rupat yang datanya diwakili oleh Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai 73,44 pada tahun 2019, 73,46 pada tahun 2020 dan 73,58 pada tahun 2021 lebih tinggi dari pencapaian IPM Provinsi Riau yaitu 73 pada tahun 2019, 72,71 pada tahun 2020 dan 72,94

pada 2021. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumberdaya manusia di wilayah Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Riau sudah cukup baik. Ini dikarenakan adanya dukungan yang nyata oleh pemerintah berupa pembangunan sarana prasarana pendidikan di wilayah Rupat, sehingga dengan adanya peningkatan sumberdaya manusia dalam hal pendidikan dapat juga menjadi sebuah langkah awal yang baik dalam membangun wilayah pulau Rupat kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian, peneliti dapat simpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Sektor potensial di Kawasan Pulau Rupat ialah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. (2) Sumber pendapatan yang menjadi pokok penghidupan semula mengandalkan hasil laut sebagai komoditas produksi mulai beralih membuka lahan untuk berkebun karet maupun sawit. (3) Pola distribusi hasil komoditas masyarakat Pulau Rupat sebagian besar hasil buminya dijual ke negara tetangga Malaysia, terutama hasil tangkapan Ikan segar dari laut. (4) Kebutuhan akan bahan makanan pokok dan lainnya, masyarakat Pulau Rupat sebelum perbaikan Infrastruktur jalan dan beroperasinya Kapal penyeberangan angkutan penumpang dan barang roll on roll off (Ro-Ro) mengkonsumsi bahan makanan pokok dari Negara Malaysia. (5) Pola konsumsi media informasi, mulai terjadi pergeseran pada tahun 2010-an masyarakat satu persatu menggunakan perangkat elektronik (parabola) yang dapat mengakses siaran televisi nasional. (6) Masih ditemukan masyarakat Pulau Rupat dalam melakukan transaksi ekonomi menggunakan Mata Uang Ringgit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mansyah. 2017. Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara (Studi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat). Jurnal Peperangan asimetris Vol. 3 No 3. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Cahyo Pamungkas. 2015. Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut; Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. Masyarakat Indonesia (MI)-LIPI. Desember 2015
- Dale, A., Ling C., & Newman, L. (2010). Community vitality: the role of community - level resilience adaptation and innovation in sustainable development. Sustainability, 2 (1),215-231
- Edi Ardian (2019). Pengaruh Media Televisi Terhadap Prilaku Remaja Di Desa Gedongan Kota Gede Yogyakarta. Jurnal Pendidikan EDUKASI 2019.
- Grigg, Neil. 1988. Infrastructure Engineering and Management, John Wiley & Sons, USA
- Hamdani M. Syam (2015). Lobalisasi Media dan Penyerapan Budaya Asing, Analisis Pada Pengaruh Budaya Populerkorea Di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmu Komunikasi VOL 3 NO.1 Juli 2015.
- John dan Smith, Hutchinson, Anthony D. 2000. Ethnicity, Oxford University Press, New York.
- Kodoatie, R.J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kwik Kian Gie. 2004. Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF, Jakarta, Granit.
- M. Husin Affan dan Hafidh Maksum (2016). Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal

- Budaya Asing Di Era Globalisasi. Jurnal Pesona Dasar. Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No.4, Oktober 2016.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Markarius Erwin Bria dan Suharno (2018). Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Strategi Penguatan Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018.
- Mesak Iek. 2013. Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Usaha Rakyat di Pedalaman May Barat Provinsi Papua Barat. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol.6, No. 1, Februari 2013. Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih.
- Moodie. 2010. Batas Negara. Pelita. Jakarta
- Muhammad Ridho Iswardhana, dkk (2017) Kedaulatan Rupiah di Perbatasan untuk Mewujudkan Keamanan Ekonomi Indonesia. Prosiding VENNAS AIHIL. Samarinda Oktober 2017.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Pulau kecil terluar.
- Pryke, Sam (2012). Economic Nationalism: Theory, History and Prospects. Global Policy: Vol.3. Issue 3. September 2012.
- Sandra I. Telussa (2022). Dampak Tayangan Televisi (Film Kartun) Terhadap Perilaku Anak Di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon. Jurnal Hipotesa, Volume. 16. No. 1 Mei 2022.
- Saru Arifin. 2009. Penanggulangan Migrasi Penduduk Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Menjaga Pertahanan dan Keamanan Wilayah Nkri Melalui Integrasi Kebijakan Keamanan (Security Approach) Dengan Kesejahteraan (Welfare Approach) Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal: (Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak Malaysia).
- Siswanto (2017). Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara Di Era Global. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Desember 2017, Volume 7 Nomor 3.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soeharto. Jakarta: LIPI Press & Yayasan Obor Indonesia.
- Todaro, M., & Smith, S. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Warsilah, H dan Wardiat, D. (2017). Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yurial Arief Lubis. 2014. Studi Tentang Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.